

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem masyarakat modern. Semakin berkembangnya kompleksitas sebuah masyarakat menuntut adanya keragaman kebutuhan pelayanan publik: pertama, masyarakat semakin membutuhkan pelayanan publik tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi; kedua, masyarakat juga membutuhkan pelayanan publik jenis lain, seperti perijinan, yang dimaksudkan untuk mendorong aktivitas-aktivitas yang lain; dan ketiga, masyarakat atau daerah tertentu membutuhkan pelayanan khusus seperti sektor pertanian, karena dianggap penting agar mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bekerja di sektor tersebut.

Tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi publik atau masyarakat. Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan terbaik akan membawa implikasi terhadap kepuasan publik atas pelayanan yang diterima.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pelayanan publik harus mencakup beberapa unsur sebagai berikut: pertama, terdapat kejelasan antara hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan. Kedua, pengaturan pelayanan publik disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Ketiga, kualitas proses dan hasil pelayanan memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Keempat, apabila pelayanan publik dirasakan terlalu mahal, harus ada peluang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan sistem pelayanan sendiri.

Kegiatan survai dalam rangka penyusunan *baseline* data pelayanan publik di DIY yang berbasis Kabupaten/Kota ini, dimaksudkan untuk menyediakan data pelayanan publik yang memadai, merumuskan parameter pelayanan publik yang berkualitas dan menyusun peta kebutuhan pelayanan publik. Dari data-data yang tersedia diharapkan para pengambil kebijakan dapat membuat perencanaan dan implementasi yang baik dalam pelayanan publik. Selain itu, data ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi jenis pelayanan tersebut.

Kerangka Pikir dan Pemilihan Bidang

Ada dua pendekatan dasar yang biasa dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan publik, yakni: pertama, pendekatan pengukuran dari kualitas kinerja pemberi layanan (*the outputs with quality dimensions approach*). Kedua, pendekatan kepuasan pelanggan/masyarakat (*the client satisfaction approach*). (Martin & Kettner, 1996) Penelitian ini menggunakan pendekatan pertama, yakni menekankan pada pemberi pelayanan (*service provider*).

Variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik dalam penelitian ini adalah 10 dimensi kualitas pelayanan dari Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1996), yaitu:

1. *Tangibles*: Penampilan fasilitas fisik, alat, teknologi dan penampilan pemberi pelayanan
2. *Reliability*: Kemampuan untuk melaksanakan pelayanan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
3. *Credibility*: Perilaku dapat dipercaya dan jujur dari pemberi pelayanan
4. *Competence*: Memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat
5. *Understanding the Customers*: Berusaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat
6. *Communication*: Menyediakan informasi yang mudah difahami dan/atau didengarkan
7. *Responsiveness*: Keinginan untuk membantu masyarakat dan menyediakan pelayanan yang tepat
8. *Courtesy*: Perilaku sopan dan menghargai masyarakat serta keramah-tamahan serta suka menolong (*helpful*)
9. *Security*: Kemampuan pemberian layanan untuk menyediakan pelayanan publik yang bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan
10. *Access*: Kemampuan menyediakan pelayanan yang mudah dijangkau dan mudah dikontak oleh warga.

Penelitian ini mencakup 4 (empat) bidang sebagai berikut: pendidikan, kesehatan, pertanian dan perijinan. Bidang pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Bidang pertanian merupakan pelayanan yang penting karena hajat hidup warga Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang bertumpu pada sektor pertanian. Sedangkan pemilihan bidang perijinan didasarkan pada kenyataan bahwa semua warga pasti berinteraksi dengan persoalan perijinan, dan bidang ini menjadi penentu daya dorong perekonomian yang ada di daerah.

Metode Pengumpulan Data dan Analisis

Unit analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah pemberi pelayanan (*provider*) yang mencakup 4 bidang dengan karakteristik yang berbeda.

1. Bidang pendidikan mencakup: SD, SMP, SMA, MI, MTs, dan MAN.
2. Bidang kesehatan mencakup: Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
3. Bidang pertanian mencakup: Unit Pelaksana Teknis Dinas, Balai Penyuluh Pertanian
4. Bidang perijinan mencakup: kecamatan

Mengingat populasi bidang pendidikan adalah sebanyak 2053 sekolah, pemilihan sampel secara bertingkat (*stratified random sampling*) dilakukan dengan mengambil sebanyak 565 sekolah. Untuk bidang lainnya dilakukan sensus, yakni bidang kesehatan dengan jumlah 112 Puskesmas dan 302 Puskesmas Pembantu; bidang pertanian dengan jumlah 63 (UPT, BPP dan Puskesmas); dan bidang perijinan dengan jumlah 76 kecamatan. Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara

wawancara langsung yang dilakukan oleh *enumerator*. Responden yang diminta untuk mengisi kuesioner adalah para pimpinan yang ada di instansi tersebut.

Penelitian ini sendiri menggunakan tiga metode untuk penggalan data, yaitu:

1. Survei dengan menyebarkan kuisisioner ke lembaga penyelenggara pelayanan publik di keempat bidang yang diteliti
2. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan dinas-dinas terkait dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pembuat kebijakan
3. Focus Groups Discussions (FGD) dengan lembaga dan *stakeholders* terkait keempat bidang

Dalam hal ini data hasil survei berfungsi sebagai data primer, sementara data dari *indepth interview* dan FGD digunakan sebagai data sekunder dalam analisa data.

Untuk melakukan survei digunakan 10 indikator sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan publik. Indikator tersebut diterjemahkan dalam bentuk parameter-parameter yang dituangkan dalam bentuk kuesioner untuk masing-masing bidang

Untuk memahami data hasil penelitian, beberapa tahapan analisis dilakukan dengan cara berikut:

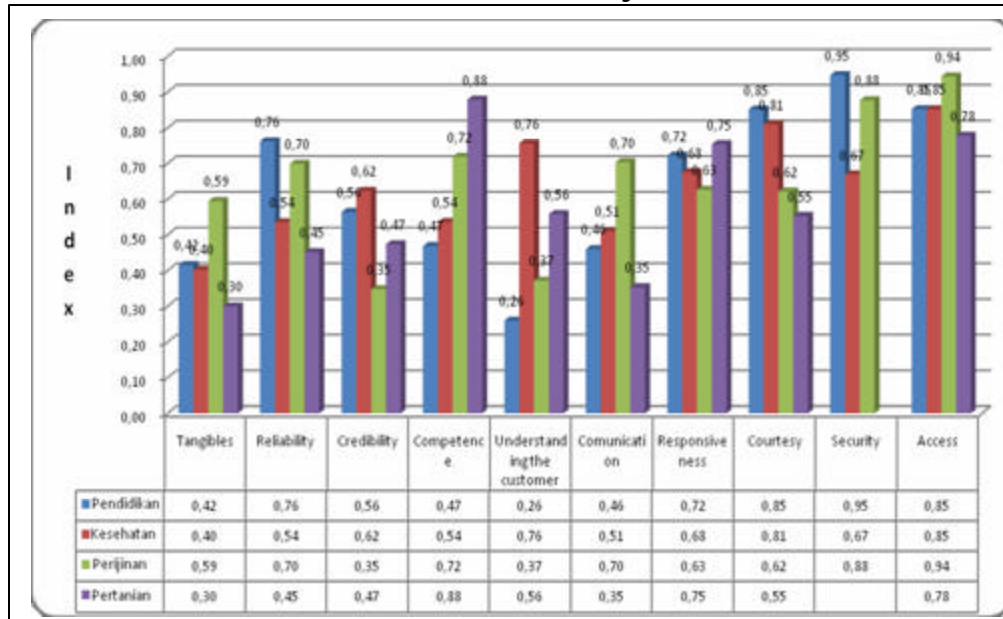
1. Data dikelompokkan berdasarkan bidang (kesehatan, pendidikan, pertanian dan perijinan).
2. Masing-masing bidang dianalisis berdasarkan 10 indikator pelayanan publik untuk mendapatkan informasi kelemahan dan kekuatan bidang tersebut berdasarkan indikator.
3. Masing-masing bidang yang telah dianalisis berdasarkan indikator dianalisis dengan membandingkan tiap bidang berdasarkan kabupaten/kota.
4. Untuk memudahkan pembacaan oleh para pengambil kebijakan, analisis dibuat berdasarkan indeks 0 (paling rendah) sampai 1 (paling tinggi). Dengan demikian, tiap-tiap bidang akan terbaca indeksnya berdasarkan 10 indikator yang ada.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian di keempat bidang ini menggambarkan adanya keragaman kualitas pelayanan publik. Aspek yang nilainya cenderung rendah menyangkut *tangibles* (kecuali untuk bidang perijinan) dan *credibility* (kecuali untuk bidang kesehatan). Rendahnya aspek *tangibles* terutama berkaitan dengan kualitas sarana fisik bangunan yang ada. Selain di bidang perijinan, pelayanan sekolah, kesehatan dan pertanian memiliki masalah dalam penyediaan sarana dan prasarana. Berkaitan dengan *credibility*, berarti bahwa pelayanan publik yang ada dinilai memiliki tingkat kepercayaan dan kejujuran yang rendah. Sedangkan aspek yang nilainya cenderung

tinggi adalah berkaitan dengan *access*, *security* dan *courtesy*. Ini bermakna bahwa tidak ada hambatan dalam hal akses masyarakat untuk menjangkau terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan *courtesy*, perilaku pemberi layanan publik memiliki sifat-sifat menghargai masyarakat, menunjukkan kesopanan dan suka membantu.

Grafik 1: Indeks Pelayanan di DIY



Sumber: Data Primer BSPP, 2007

Untuk lebih tajam, analisis data akan dilakukan dengan melakukan kajian per bidang sebagai berikut: kesehatan, pendidikan, perijinan dan pertanian.

1. Bidang Kesehatan

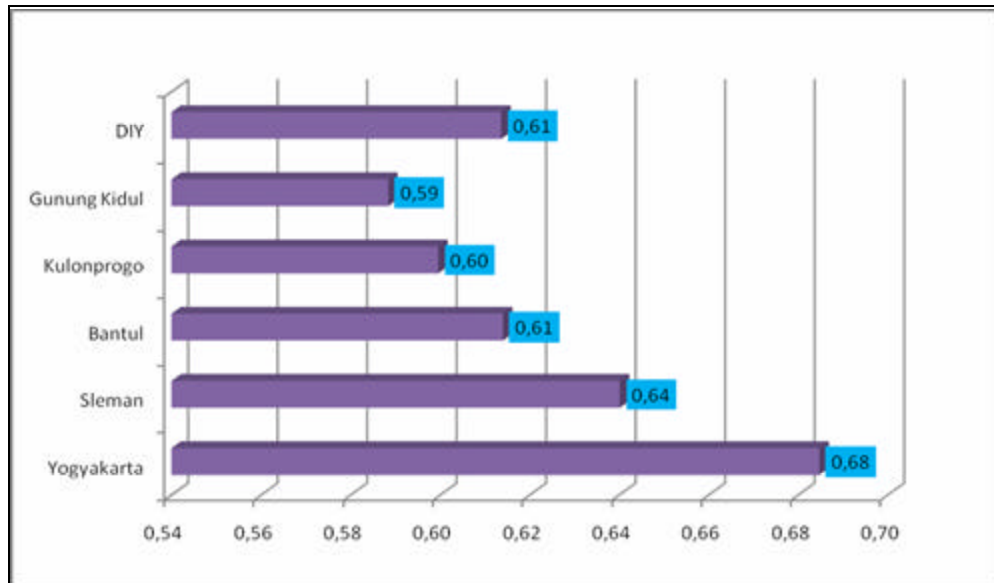
Dari hasil survei itu diketahui bahwa indeks kualitas pelayanan kesehatan di DIY adalah 0,613. Dua daerah yang memiliki indeks di bawah indeks propinsi, yaitu Gunungkidul (0,588) dan Kulon Progo (0,599). Satu daerah yang memiliki indeks yang hampir sama dengan propinsi, yaitu Bantul (0,614). Sedangkan dua daerah lagi memiliki indeks lebih tinggi



Forum Uji Sahih Baseline, Agustus 2007

dibanding propinsi, yaitu Sleman (0,640) dan Kota Yogyakarta (0,684). Indeks ini mengindikasikan tentang kualitas pelayanan kesehatan di masing-masing daerah.

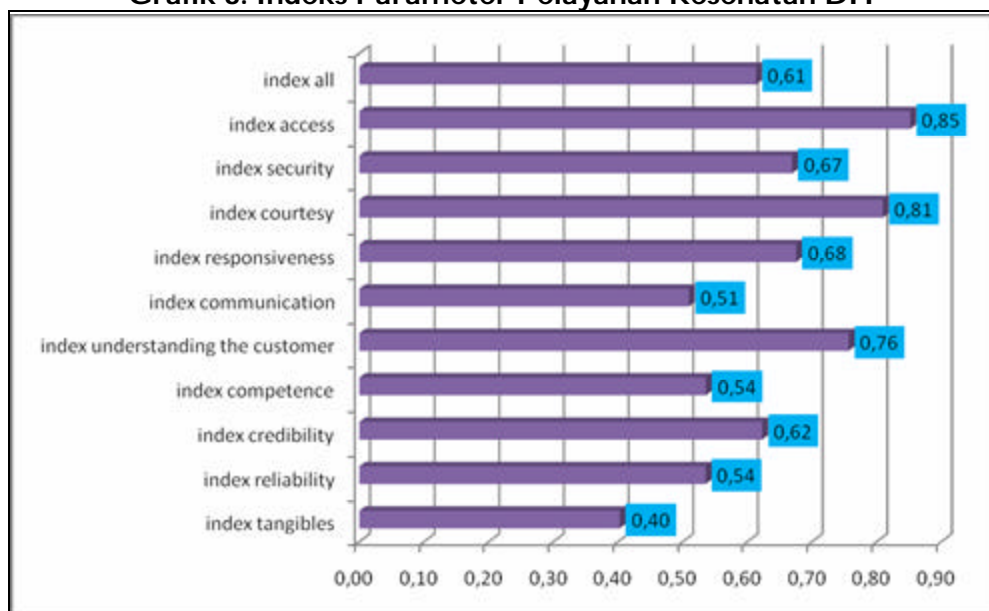
Grafik 2: Indeks Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) DIY



Sumber: Data Primer BSPP, 2007

Selain itu, dari 10 parameter yang digunakan dalam survei ini, parameter terburuk adalah *tangibles* dengan indeks 0,40. Parameter lain yang juga kurang baik yang memiliki indeks di bawah indeks propinsi adalah *communication*, *competences* dan *reliability*. Sedangkan parameter yang berada di posisi medium, artinya indeks yang dimiliki hampir sama atau tidak terlalu jauh dari indeks propinsi adalah *credibility*, *responsiveness* dan *security*. Parameter terbaik adalah *access* dengan indeks 0,85, disusul oleh *courtesy* 0,81 dan *understanding the customers* 0,76.

Grafik 3: Indeks Parameter Pelayanan Kesehatan DIY

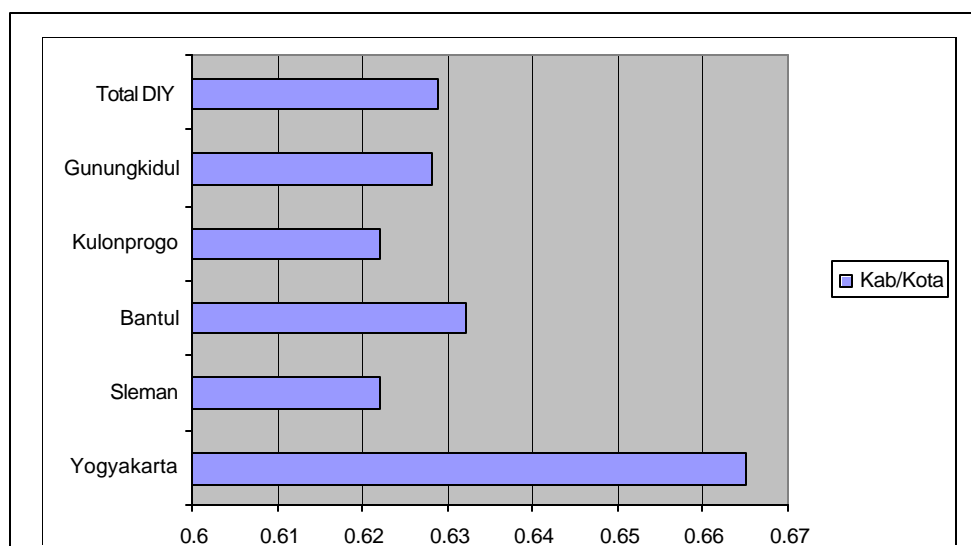


Sumber: Data Primer BSPP, 2007

2. Bidang Pendidikan

Berdasarkan data survei, indeks kualitas pelayanan pendidikan di DIY adalah 0,629. Indeks tersebut lebih rendah dari indeks kualitas pelayanan pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta (0,665) dan di Bantul (0,632). Indeks kualitas pelayanan pendidikan di kabupaten lain adalah sebagai berikut: Sleman (0,622), KulonP rogo (0,622) dan Gunung Kidul (0,628).

Grafik 4: Indeks Pelayanan Pendidikan DIY Berdasarkan Wilayah



Sumber: Data Primer BSPP, 2007

Baseline Survey untuk bidang pendidikan menunjukkan bahwa indeks kualitas pelayanan pendidikan berdasarkan 10 indikator yang dipakai dalam penelitian ini cukup bervariasi. Untuk aspek: *reliability*, *responsiveness*, *courtesy*, *security* dan *access* terlihat indeks pelayanan pendidikan di DIY memiliki skor yang tinggi (rata-rata di atas 0,7). Namun demikian apabila dilihat dari indikator yang lain, yaitu: *tangibles*, *credibility*, *competence*, *understanding customer* dan *communication* indeksnya masih sangat rendah.



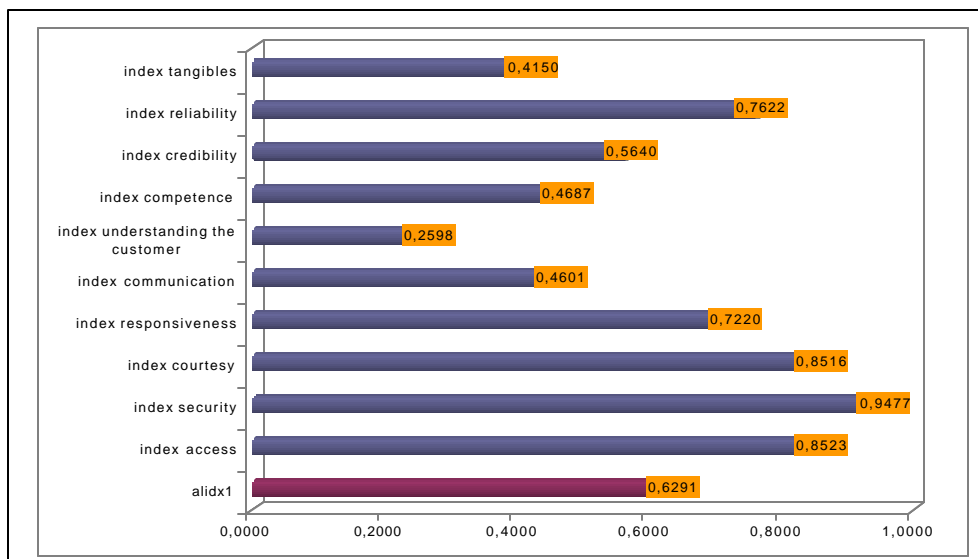
Rekomendasi baseline untuk sektor Pendidikan

Untuk dua yang terakhir, yaitu: *understanding customer* dan *communication* skor indeksnya bahkan jauh di bawah indikator yang lain. Dengan demikian temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dalam beberapa hal pelayanan pendidikan di DIY sudah ada tanda-tanda baik, namun demikian pelayanan pendidikan di DIY belum dilakukan dengan cara

demokratis dengan memposisikan siswa dan orang tua siswa sebagai *valuable customer* yang perlu mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dengan cara:

- (a) memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka serta
- (b) mengkomunikasikan berbagai persoalan apa yang dilakukan sekolah dengan para siswa didik dan orang tua.

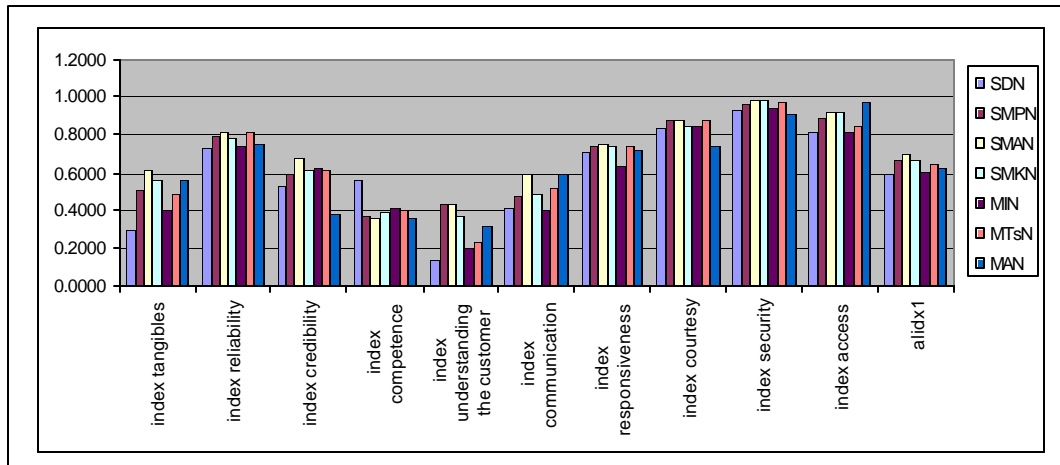
Grafik 5: Indeks Pelayanan Pendidikan DIY



Sumber: Data Primer BSPP, 2007

Apabila dicermati lebih dalam, indikator-indikator yang indeksnya rendah dapat dibedakan dari aspek tingkatan sekolah. Yang terkait dengan tangibles, SD nampaknya memiliki indeks yang paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Demikian pula yang terkait dengan understanding the customers, indeks untuk SD menunjukkan paling rendah dibandingkan tingkatan sekolah yang lain.

Grafik 6: Indeks Pelayanan Pendidikan DIY Berdasarkan Tingkatan Sekolah



Sumber: Data Primer BSPP, 2007

3. Bidang Perijinan

Dari survei diperoleh kuesioner lengkap yang berasal dari 76 responden sedangkan wawancara mendalam dilakukan kepada para pejabat di Dinas Perizinan Kota Jogjakarta, kantor UPTSA di kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulonprogo, dan KPPTSP di kabupaten Gunungkidul.

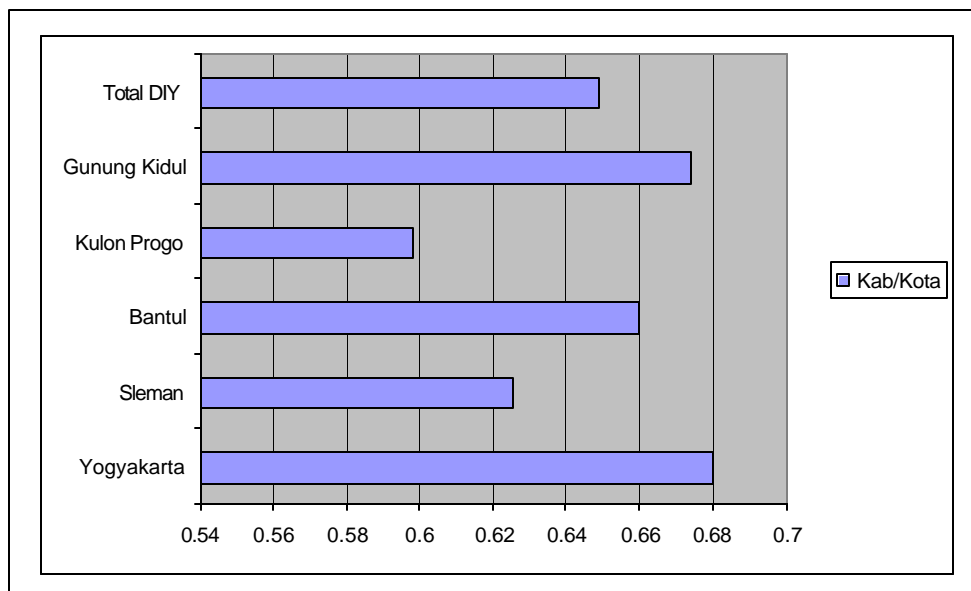


Uji sah baseline bidang perijinan

Selain itu analisis juga dilakukan terhadap data sekunder yang berasal dari dokumentasi di lapangan serta sumber-sumber publikasi mengenai pelayanan perijinan.

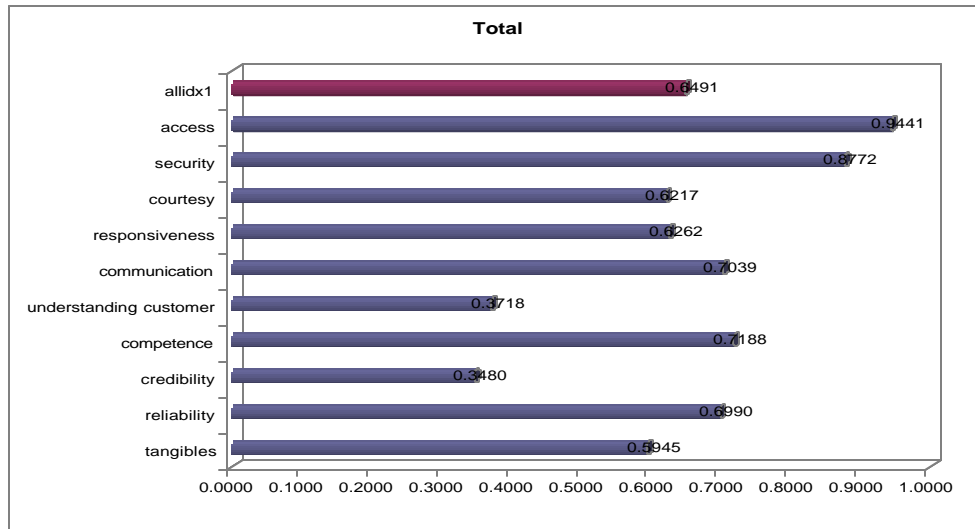
Analisis terhadap data primer pelayanan di tingkat Kecamatan menunjukkan bahwa rata-rata indeks pelayanan perijinan masih rendah dengan angka total sebesar 0,649. Indeks tertinggi terdapat di kota Jogjakarta dengan angka sebesar 0,68 sedangkan terendah terdapat di kabupaten Kulonprogo dengan angka sebesar 0,598.

Grafik 7: Indeks Pelayanan Perijinan Berdasarkan Kabupaten/Kota



Sumber: Data Primer BSPP, 2007

Grafik 8 : Indeks Pelayanan Perijinan di Provinsi DIY



Sumber: Data Primer BSPP, 2007

Ditinjau dari variabel pokok yang dipakai di dalam penelitian ini, indeks aksesibilitas atau kemudahan mencapai angka tertinggi sebesar 0,94 dan diikuti indeks keamanan dengan angka sebesar 0,872; sedangkan indeks terendah adalah kredibilitas dengan angka 0,34 dan indeks pemahaman terhadap pelanggan dengan angka sebesar 0,35.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian kecamatan sudah mulai dilibatkan secara aktif dalam pelayanan perijinan oleh Pemerintah Daerah, tetapi cukup banyak pejabat di tingkat kecamatan yang belum merasa melakukan pelayanan perijinan secara utuh. Para pejabat yang membidangi masalah perizinan tampaknya masih menghadapi kompleksitas tujuan di dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, antara tujuan meningkatkan responsivitas dan efisiensi pelayanan dengan peningkatan PAD dari retribusi perijinan.

Terdapat kecenderungan bahwa para perumus kebijakan di bidang perijinan masih terlalu mengutamakan hal-hal yang bersifat fisik atau *tangibles* sedangkan hal-hal yang menyangkut responsivitas pelayanan, etiket pelayanan, dan integritas dalam pelayanan belum banyak diperhatikan. Kebijakan pimpinan daerah mengenai peningkatan kualitas perijinan terbukti sangat kuat pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas. Kecuali itu secara umum pihak pemberi pelayanan masih cenderung melihat peran mediator atau calo dalam pelayanan perijinan sebagai sesuatu yang biasa atau tidak terhindarkan.

4. Bidang Pertanian

Berdasarkan indeks dengan skala 0-1, indeks untuk sektor pertanian hanya sedikit diatas batas minimal kelulusan, yakni 0.56. Indeks tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, yang merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk

Indonesia, masih menjadi sektor yang terabaikan. Dijadikannya sektor pertanian sebagai urusan pilihan dari pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU 32/2004, kian membuat tidak adanya standard pelayanan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian. Akibatnya pemerintah daerah mengapresiasi urusan pengelolaan sektor pertanian secara beragam.



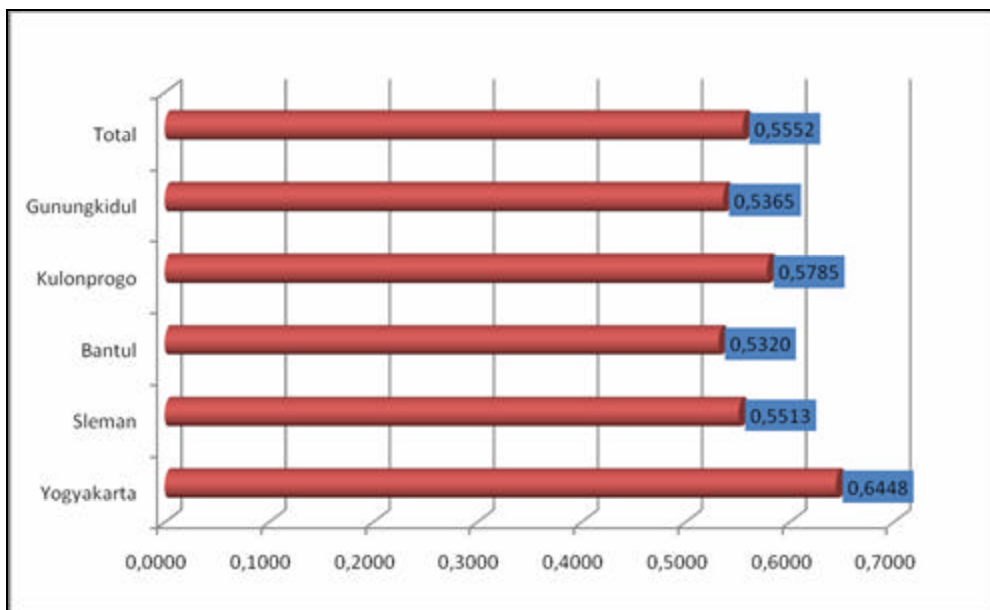
Uji sahil bidang Pertanian

Dari lima kabupaten/kota di DIY, masing-masing memiliki proporsi komunitas petani yang relatif berbeda, hal itu yang kemudian menjadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk membentuk dinas, UPTD, BPP dan Puskeswan terkait dengan pengembangan sektor pertanian, dengan komposisi dan jumlah relatif berbeda.

Namun perbedaan perhatian pemerintah daerah tersebut masih tetap membuat kinerja pelayanan publik di sektor pertanian di kelima daerah tersebut masih tetap kurang menggemirakan.

Adapun indeks dari masing-masing daerah atas kinerja pelayanan di sektor pertanian sebagai berikut :

Grafik 9: Indeks Pelayanan Pertanian Berdasarkan Kabupaten/Kota

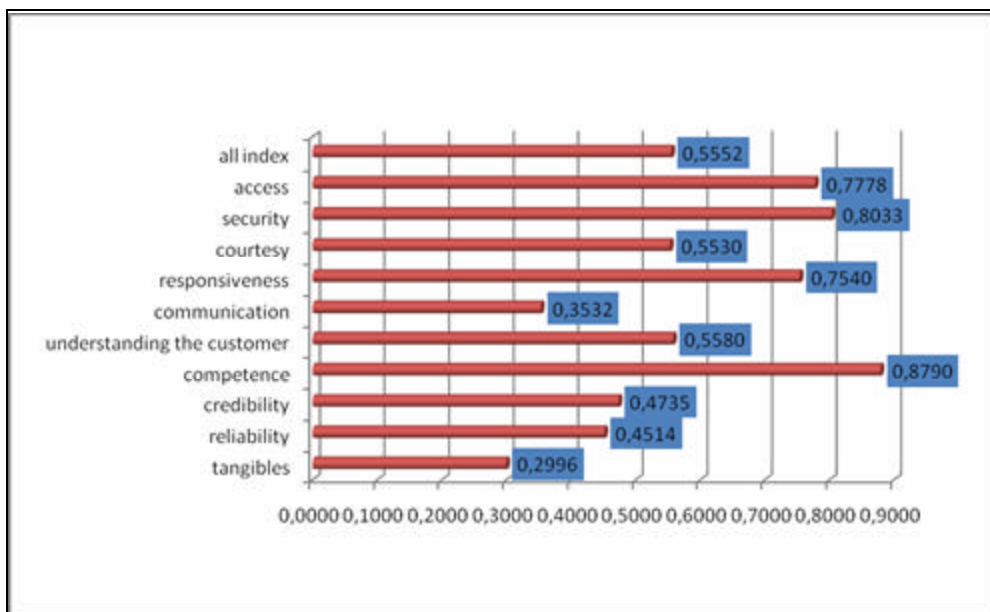


Sumber: Data Primer BSPP, 2007

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman masing-masing menempati urutan dari paling rendah dari tiga daerah yang kinerja pelayanan publik di sektor pertanian di bawah rata-rata DIY. Sementara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo merupakan dua daerah yang pelayanannya di atas rata-rata DIY.

Dilihat dari indeks 10 indikator yang dijadikan parameter untuk melihat kinerja pelayanan, maka dapat dilihat komposisi indeks masing-masing indikator sebagai-berikut; akses 0,78; security 0,80; courtesy 0,55; responsiveness 0,75; communication 0,35; understanding the customer 0,56; competence 0,88; credibility 0,47; reliability 0,45 dan tangibles 0,30.

Grafik 10: Indeks Pelayanan Pertanian DIY



Sumber: Data Primer BSPP, 2007

Dari data tersebut menunjukkan bahwa secara umum unit-unit layanan di sektor pertanian sangat lemah untuk indikator tangibles, communication, reliability dan credibility. Keempat indikator tersebut indeksnya sangat buruk, yakni di bawah 0,50. Bahkan untuk indikator tangibles dan communication masing-masing indeksnya 0,30 dan 0,35.

Sedangkan indikator yang memiliki kinerja cukup bagus adalah competence, security, access dan courtesy, yang masing-masing dengan indeks antara 0,75-0,88. Hal itu menunjukkan bahwa dari aspek kualitas SDM pimpinan dan staf serta aksesibilitas publik terhadap unit layanan cukup baik. Ketersediaan SDM yang berkualitas serta sempitnya wilayah DIY dan bagusnya infrastruktur transportasi membuat ketiga indikator tersebut memiliki performance yang bagus. Namun keterbatasan dukungan anggaran di sektor pertanian dan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian, membuat

indikator lain justru memiliki kinerja yang sangat buruk, sehingga secara kumulatif membuat kinerja pelayanan publik untuk sektor pertanian tidak cukup bagus.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelayanan publik masing-masing bidang.

Untuk bidang kesehatan, rekomendasi yang diusulkan:

1. Peningkatan kualitas *tangibles*
 - a. Perlu adanya standar kelayakan bangunan fisik dan ruang-ruang pelayanan kesehatan
 - b. Perlu adanya standar kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja
 - c. Perlu adanya standar kelayakan alat-alat medis dan penunjang medis
 - d. Perlu SOP perawatan terhadap semua fasilitas unit pelayanan kesehatan, baik Puskesmas maupun Pustu.
2. Peningkatan kualitas *reliability*
 - a. Perlu instrumen standar penilaian kinerja beserta prosedur implementasinya
 - b. Perlu instrumen standar pengukuran kepuasan pelanggan beserta prosedur implementasinya
 - c. Perlu sistem atau mekanisme pembiayaan Puskesmas/Pustu yang sama di wilayah propinsi DIY ini.
3. Peningkatan kualitas *credibility*
 - a. Perlu pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Prosedur Kerja medis (SPK) dan memastikan bahwa setiap unit layanan kesehatan sudah mempunyai SPK tersebut.
 - b. Perlu adanya SOP tentang audit internal, terutama audit medis.
4. Peningkatan kompetensi petugas medis
 - a. Perlu perencanaan yang baik tentang pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga medis dalam meningkatkan kompetensinya. Perlu pelatihan yang terstruktur dan terukur.
 - b. Perlu disiapkan dan dipastikan bahwa setiap unsur profesi yang terlibat dalam pelayanan medis telah memiliki sertifikasi standar profesi.
5. Peningkatan kualitas *security*
 - a. Perlu dikaji ulang rasio ketercukupan tenaga medis di setiap wilayah layanan kesehatan
 - b. Perlu dipastikan bahwa standar *Patient Safety* telah diterapkan dengan baik
 - c. Perlu dipastikan bahwa sistem pengelolaan limbah kesehatan telah sesuai dengan SOP yang ada.

Untuk bidang pendidikan, rekomendasi perbaikan pelayanan publik menyangkut:

1. Perbaikan pelayanan pendidikan Sekolah Dasar: perlu perhatian yang lebih besar untuk Sekolah Dasar karena dilihat dari indeks pelayanan pendidikan SD berada pada kondisi yang buruk.
2. Perbaikan komunikasi: perlu mendemokratisasikan pelayanan pendidikan dengan lebih banyak membuka saluran untuk masyarakat agar mereka memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi
3. Perlu perhatian perbaikan fisik (tangibles) terutama untuk daerah-daerah yang berada di pelosok-pelosok.

Untuk bidang perijinan, ada beberapa rekomendasi yang diusulkan, yakni:

1. Perlu perhatian serius terhadap perijinan sebagai kebijakan yang memiliki dampak jangka panjang, utamanya terkait dengan dampak investasi. Dalam hal ini, pemerintah perlu menegaskan perannya bahwa perijinan bukan ditujukan untuk peningkatan retribusi.
2. Dalam perbaikan pelayanan perijinan, pemerintah perlu berorientasi untuk memperbaiki aspek non fisik seperti peningkatan tatacara pelayanan, dan bukan sekedar berkonsentrasi pada aspek fisik semata.
3. Perlu komitmen bupati yang tegas mengenai aspek positif pelayanan perijinan yang lebih baik. Harus dipahami bahwa perijinan merupakan instrumen fasilitasi dan instrumen kendali. Kalau bersifat fasilitasi, maka proses perijinan harus dilakukan dengan biaya semurah-murahnya dan waktu yang secepat-cepatnya. Apabila perijinan tertentu terkait dengan fungsi kendali, maka prosesnya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi juga harus memberikan kepastian mengenai waktu dan biaya pelayanan.

Untuk bidang pertanian, beberapa hal yang bisa direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun Pertanian sebagai urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah, namun karena sektor tersebut merupakan pekerjaan mayoritas penduduk, maka Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sektor tersebut dengan memberdayakan unit-unit layanan pemerintah di sektor tersebut, seperti UPTD/BPP.
2. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja UPTD/BPP disamping diperlukan penguatan support dari pemerintah daerah dengan jalan peningkatan support anggaran dan program, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun platform bersama antar dinas terkait tentang upaya pengembangan sektor pertanian serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar dinas terkait dan UPTD/BPP di masing-masing dinas.

3. Pemerintah Daerah perlu memperjelas ruang lingkup kewenangan dinas/kantor terkait dengan pengembangan sektor pertanian dengan didukung infrastruktur dan support sistem yang memadai untuk meningkatkan kinerja unit-unit layanan publik di sektor pertanian seperti UPTD atau BPP.